

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Jepang Nomor 101 Tahun 2002 tentang Penghapusan dan Pencegahan Persekongkolan dalam Pengaturan Lelang, dan Hukuman atas Tindakan oleh Karyawan yang Merugikan Keadilan Penawaran (*Act on Elimination and Prevention of Involvement in Bid Rigging, etc. and Punishments for Acts by Employees that Harm Fairness of Bidding, etc.*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Jepang Nomor 54 Tahun 1947 tentang Larangan Monopoli Swasta dan Pemeliharaan Perdagangan yang Adil (*Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade*)

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*)

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Putusan Nomor 9/G/2021.PTUN.JBI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 25/KPPU-I/2020.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 18/KPPU-L/2022.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-L/2022.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 18/KPPU-L/2023.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-L/2024.

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk.

Buku

Alvat, Pradikta Andi. *Hukum dan Daulat Rakyat Sebuah Ironi* (Bogor: Guepedia, 2020).

Anderson, Robert D. et. al., *Combating Corruption and Collusion in Public Procurement: A Challenge for Governments Worldwide*, (England: OUP Oxford, 2024).

Arsyad, Jawade Hafidz dan Dian Karisma. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Jakarta: Sinargrafika, 2018).

Dewobroto, Maduseno. Persekongkolan Tender pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-L/2007 dan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2007), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269699-T37383-Muduseno%20Dewobroto.pdf>, UI, 2008.

Fadlan, Muhammad. Rekonstruksi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan, <https://repository.unissula.ac.id/30984/1/10302000054.pdf> (Unissula, 2022).

Hayashi, Shuya, Wu, Kunlin, dan Ma, Xiaoyu. The Japanese competition law in its own way: a historical review of the AMA and its characteristics dalam buku *Research Handbook on Asian Competition Law* (USA: Edward Elgar Publishing, 2020).

Japan Fair Trade Commission, JFTC Annual Report, <https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/1254149&bundleNo=1&contentNo=1>, 2000.

Kawai, Kozo dan Shimada, Madoka. *Merger control in Japan: Select jurisdictional, procedural and substantive development* dalam buku *Research Handbook on Global Merger Control* (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2023).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender yang Diterbitkan KPPU*, Tahun 2009.

- Matsushita, Mitsuo. *The Antimonopoly Law of Japan pada Buku Global Competition Policy* (Washington DC: Institute for International Economics, 1997).
- Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cendekia Press, 2023).
- Murni dan Djulaeka. *Hukum Dagang dalam Perspektif Globalisasi*, (Surabaya: Scopindo, 2022).
- Sadewa, Ganianto Ajie. Larangan Persekongkolan Tender Sektor Jasa Konstruksi Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2014, Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015, dan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/22016), https://digilib.uinsgd.ac.id/27206/4/4_bab1.pdf (UIN Sunan Gunung Djati, 2018).
- Sanekata, Kenji dan Wilks, Stephen. *The Fair Trade Commission and the Enforcement of Competition Policy in Japan dalam Buku Cimparative Competition Policy: National Institutions in a Global Market* (Great Britan: Oxford, 2001).
- Organisation for Economic Co-operation and Development, *Regulatory Reform in Japan*, OECD Publishing, 1999.
- Panggabean, H.P. *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2022).
- Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan & Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Susilo, Agus Budi. “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam Konteks Kompetensi Absolut PTUN” dalam *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer ed. Subur et.al.* (Yogyakarta: Genta, 2014).
- Tamura, Jiro. *Market Access Issues in Japan’s Antimonopolu Law dalam Buku Competition Policy in the Global Trading System: Perspectives from the Eu, Japan and the USA* (Netherlands: Springer Netherland, 2002).
- Umeda, Sayuri. *Japan: Foreign Law Brief: Antimonopoly Law*, (Washington DC: Law Library of Congress, 2003).

Uytsel, Steven Van. Algorithmic Hub-and-Spoke Cartels: A Japanese Perspective dalam buku *The Digital Economy and Competition Law in Asia*, (Singapore: Springer, 2021).

Wakui, Masako. *Bid Rigging Initiated by Government Officials: The Conjuncture of Collusion and Corruption in Japan* dalam Buku *Cartels in Asia: Law and Practice* (Hongkong: Wolters Kluwer, 2015).

Walle, Simon Vande. *Private Antitrust Litigation in the European Union and Japan: A Comparative Perspective* (Belgium: Maklu, 2013).

Wibowo, Richo Andi. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).

Artikel Jurnal

Hadiyati, Nur. “Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang”, *Jurnal Pengadaan* 1 (2017).

Kurita, Makoto. *Impediments to Effective Enforcement of Competition Law: Institutional Flaws in the Antimonopoly Act of Japan and Its Enforcement*, Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers Vol. 10 (2011).

Soto, Takaki. *Suppressing Bid Rigging: Lessons from Japan*, 2016, https://scholarship.law.columbia.edu/public_integrity/67.

Sunge, Maisara. “Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah”, *Jurnal INOVASI* 6 (2009).

Suzuki, Takayuki. *The Function of Criminal Punishment under the Antimonopoly Act of Japan*, *New Journal of European Criminal Law* Volume 2 No. 1 (2011).

Tanaka, Satoru dan Hayashi, Shuya. *Collusion Between Public Procurers and Suppliers in the Context of Japan’s Public Procurement: the Role of the Risks of “Unsuccessful Procurement”*, *Journal of Public Procurement*, Volume 16, Issue 3, 2016.

Tanno, Tadanobu dan Hirai, Takayuki. *Collusion, Breakdown, and Competition in Procurement Auctions*, Manuscript, Dpet. Econ., Atomi Univ, 2012.

Walle, Simon Vande dan Shiraishi, Tadashi. *Competition Law in Japan*, SSRN Electronic Journal, 2015.

Weishaar, Stefan. *Law and Economics Analysis of the Current Japanese Antimonopoly legislation*, COE/JEPA Joint International Conference, 2005.

Wuisang, Ari. “Tanggung Gugat Publik terhadap Tindakan Pemerintahan dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan”, *Pakuan Lawa Review* 7 (2021).